

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bentuk kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh individu atau organisasi dengan cakupan aktivitasnya berfokus pada skala kecil. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan secara individu dengan tujuan menghasilkan keuntungan, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan (Abid, 2021). Posisi UMKM sangat penting dalam perekonomian Indonesia dengan menyumbangkan sekitar 99% dari keseluruhan unit bisnis nasional (KADIN, (2024); Kemenkopukm, (2024). Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian Indonesia

Indikator	Jumlah
Unit usaha UMKM	30,18 juta unit usaha
Kontribusi ke PDB nasional	60,5%
Penyerapan tenaga kerja	97%
Kontribusi terhadap investasi nasional	60%

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 1.1 kontribusi UMKM menjadi penopang utama perekonomian nasional dan penggerak pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun, kontribusi yang diberikan UMKM ini memiliki berbagai tantangan, seperti minimnya pemanfaatan teknologi, sulitnya mendapatkan dana, serta

kurangnya pelatihan dan standar usaha. Situasi ini mengakibatkan banyak UMKM berada dalam keadaan yang tidak stabil, terutama saat berhadapan dengan ketatnya persaingan dan perubahan di era ekonomi digital (KADIN, 2024; Kurniawan & Iskandar, 2023). Pada lingkup regional, UMKM juga menjadi tulang punggung perekonomian di Pulau Madura. Jumlah UMKM di Madura dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Jumlah UMKM di Madura

Indikator	Jumlah
Kabupaten Sumenep	401.210 unit
Kabupaten Pamekasan	247.269 unit
Kabupaten Sampang	229.644 unit
Kabupaten Bangkalan	248.664 unit

Sumber: Dinkop dan UKM Jawa Timur tahun, 2020

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa Kabupaten Sumenep memiliki jumlah UMKM terbanyak, disusul oleh Bangkalan, Pamekasan, dan Sampang (Anam & Qadariyah, 2024). Dari empat kabupaten tersebut, Bangkalan menempati posisi yang strategis karena berdekatan dengan Surabaya melalui Jembatan Suramadu. Kedekatan ini menjadikan Bangkalan sebagai wilayah dengan peluang besar untuk mengembangkan pasar dan memperluas jangkauan usaha. Menurut Diskopumdag (2023), terdapat 82.252 unit usaha yang tersebar di 18 Kecamatan, Kabupaten Bangkalan. Sebagian besar pelaku usaha di Bangkalan tergolong dalam kategori usaha mikro, yaitu sebesar 78.794 unit usaha (95.8%). Sementara itu, usaha kecil hanya sekitar 3.159 unit usaha (3,8%) dan usaha menengah sekitar 299 unit usaha (0,4%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Bangkalan masih beroperasi dengan sistem

manajemen yang sederhana dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan usahanya serta perekonomian daerah didominasi oleh usaha mikro yang memiliki keterbatasan modal, sumber daya manusia, dan keterampilan manajemen. Selain itu, jika dilihat dari jenis usaha, sektor agribisnis menjadi yang terbesar di Kabupaten Bangkalan dengan jumlah 125.113 unit, kemudian diikuti sektor otomotif yang mencatat 37.302 unit, dan sektor kuliner dengan total 14.090 unit usaha (Diskopumdag, 2024).

Meskipun jumlah UMKM di bidang makanan dan minuman tidak sebanyak di sektor pertanian, sektor ini memiliki potensi pertumbuhan yang cukup tinggi karena lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi, seperti menggunakan media sosial untuk promosi dan pemasaran digital (Pellegrino & Abe, 2023). Namun, potensi pertumbuhan UMKM di Bangkalan masih dibayangi berbagai kendala serius, seperti rendahnya literasi keuangan, lemahnya praktik pengelolaan keuangan, serta keterbatasan adaptasi digital. Rendahnya pemahaman literasi keuangan membuat pelaku usaha kesulitan dalam mengelola keuangan secara efektif, sementara terbatasnya akses terhadap pembiayaan resmi semakin menghambat keberlanjutan usaha (Aribawa, 2016).

Salah satu aspek paling penting dalam keberlanjutan usaha adalah keberlanjutan keuangan, yaitu kemampuan usaha untuk mengatur arus kas, memenuhi tanggung jawab, serta mampu beradaptasi untuk jangka panjang, meskipun menghadapi tekanan ekonomi dan perubahan pasar (Sitorus *et al.*, 2024). Keberlanjutan keuangan ini menjadi fondasi stabilitas usaha sekaligus berkontribusi pada *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDGs

8 yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang merata, produktivitas, dan penyediaan pekerjaan yang layak, serta SDGs 12 yang mendorong praktik usaha yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab (Nations, 2015).

Keberlanjutan keuangan UMKM menuntut adanya kapasitas internal yang memadai dalam pengambilan keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan literasi keuangan dan pengelolaan keuangan (Masdiantini *et al.*, 2024). Literasi keuangan berperan dalam membekali pelaku usaha dengan pemahaman serta kemampuan menerapkan konsep keuangan secara rasional dalam aktivitas bisnis. Sementara itu, pengelolaan keuangan yang efektif tercermin melalui proses perencanaan, pencatatan, pemantauan, dan pengendalian keuangan yang sistematis guna menjaga kesinambungan operasional usaha (Huston, 2010; Rumbianingrum & Wijayangka, 2018). Kedua aspek ini antara literasi dan pengelolaan keuangan memungkinkan UMKM mengelola arus kas secara lebih optimal, meminimalkan potensi kesalahan finansial, serta memperkuat keberlanjutan keuangan. Meskipun demikian, upaya menjaga keberlanjutan keuangan tidak semata-mata ditentukan oleh faktor internal, melainkan juga dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam merespons dinamika lingkungan bisnis, terutama tuntutan transformasi digital.

Seiring berkembangnya teknologi dalam aktivitas bisnis, kemampuan UMKM untuk menyesuaikan diri dengan pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor yang semakin menentukan. Perbedaan mendasar antara transformasi digital dan adaptasi digital terletak pada cakupan perubahan yang dilakukan, di

mana transformasi digital menuntut perubahan menyeluruh pada model usaha, sedangkan adaptasi digital lebih menekankan pada proses penyesuaian bertahap melalui penggunaan teknologi yang selaras dengan kapasitas sumber daya pelaku usaha. Adaptasi digital mencerminkan kemampuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam memahami, menerima, serta mengimplementasikan teknologi digital ke dalam aktivitas operasional usaha (Sitorus *et al.*, 2024). Penerapannya dapat berupa penggunaan aplikasi pencatatan keuangan digital, sistem pembayaran non-tunai, serta pengelolaan keuangan berbasis aplikasi. Pemanfaatan teknologi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi operasional, peningkatan transparansi, dan ketepatan pencatatan keuangan, sehingga mendukung pengendalian keuangan secara lebih optimal (Suleman & K. Thalib, 2024).

Literasi keuangan, pengelolaan keuangan, dan adaptasi digital dipandang penting dalam mendukung keberlanjutan keuangan. Namun, penelitian yang menggabungkan ketiganya secara simultan sangat terbatas. Penelitian Al-shami *et al.* (2024), berfokus pada hubungan antara literasi keuangan dengan inklusi keuangan, sedangkan Ilfi *et al.* (2024), mengukur pengaruh pengelolaan keuangan terhadap keberlanjutan usaha. Sementara itu, penelitian Suleman & K. Thalib (2024), menguji digitalisasi terhadap kinerja usaha. Kajian yang mempelajari bagaimana literasi keuangan, pengelolaan keuangan dan adaptasi digital secara bersama-sama mempengaruhi keberlanjutan keuangan UMKM, terutama di daerah cukup terbatas.

Literasi keuangan yang tinggi dan pengelolaan keuangan yang disiplin mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi, sehingga adaptasi digital berperan sebagai jembatan yang menghubungkan keduanya dengan keberlanjutan keuangan. Oleh karena itu, adaptasi digital lebih tepat diposisikan sebagai variabel perantara untuk menjelaskan hubungan antara literasi keuangan dan pengelolaan keuangan terhadap keberlanjutan keuangan, bukan hanya memperkuat atau memperlemah pengaruh antar variabel. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan komprehensif untuk melihat peran ketiga variabel secara bersamaan dalam meningkatkan keberlanjutan keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh literasi keuangan dan pengelolaan keuangan terhadap keberlanjutan keuangan, dengan adaptasi digital sebagai variabel mediasi. UMKM di Kabupaten Bangkalan dipilih karena memiliki potensi besar sekaligus menghadapi kendala nyata pada literasi keuangan, pengelolaan keuangan, dan adaptasi digital. Diharapkan penelitian ini memberi kontribusi empiris bagi pengembangan teori, sekaligus menjadi dasar strategi pemberdayaan UMKM yang lebih kontekstual dan terukur.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap keberlanjutan keuangan UMKM kuliner di Kabupaten Bangkalan?
2. Apakah pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap keberlanjutan keuangan UMKM kuliner di Kabupaten Bangkalan?

3. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap adaptasi digital UMKM kuliner di Kabupaten Bangkalan?
4. Apakah pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap adaptasi digital UMKM kuliner di Kabupaten Bangkalan?
5. Apakah adaptasi digital berpengaruh terhadap keberlanjutan keuangan UMKM kuliner di Kabupaten Bangkalan?
6. Apakah adaptasi digital dapat memediasi literasi keuangan terhadap keberlanjutan keuangan UMKM kuliner di Kabupaten Bangkalan?
7. Apakah adaptasi digital dapat memediasi pengelolaan keuangan terhadap keberlanjutan keuangan UMKM kuliner di Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap keberlanjutan keuangan UMKM kuliner di Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan terhadap keberlanjutan keuangan UMKM kuliner di Kabupaten Bangkalan.
3. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap adaptasi digital UMKM kuliner di Kabupaten Bangkalan.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan terhadap adaptasi digital UMKM kuliner di Kabupaten Bangkalan.
5. Untuk mengetahui pengaruh adaptasi digital terhadap keberlanjutan keuangan UMKM kuliner di Kabupaten Bangkalan.

6. Untuk mengetahui peran mediasi adaptasi digital dalam literasi keuangan terhadap keberlanjutan keuangan UMKM kuliner di Kabupaten Bangkalan.
7. Untuk mengetahui peran mediasi adaptasi digital dalam pengelolaan keuangan terhadap keberlanjutan keuangan UMKM kuliner di Kabupaten Bangkalan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian manajemen keuangan, terutama dalam menjelaskan keterkaitan literasi keuangan dan pengelolaan keuangan terhadap keberlanjutan keuangan dengan memasukkan adaptasi digital sebagai variabel mediasi. Selain itu, temuan yang dihasilkan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu sejenis, khususnya yang berfokus pada penguatan kinerja dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi perkembangan era digital.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diarahkan untuk memberikan gambaran mengenai peran strategis peningkatan literasi keuangan dan penerapan pengelolaan keuangan yang efektif dalam menjaga keberlanjutan

keuangan usaha. Kajian ini juga menegaskan peran adaptasi digital sebagai upaya strategis dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha.

b. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pendukung UMKM

Penelitian ini memberikan masukan dalam merancang program pemberdayaan UMKM, terutama yang berfokus pada peningkatan literasi keuangan, penguatan pengelolaan keuangan, dan mendorong adaptasi digital usaha. Oleh karena itu, strategi yang dikembangkan dapat lebih relevan dan selaras sesuai kondisi faktual yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Bangkalan.